

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik, oleh karena itu suatu program harus dilaksanakan agar dapat memberikan dampak atau tujuan yang diinginkan (Situmorang, 2016). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebelum adanya suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu hal yang menjadi aspek dalam proses implementasi kebijakan publik adalah aspek operasional yang secara umum kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan atau regulasi yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah publik (Sutikno & Yusuf, 2023). Ada berbagai bidang yang menjadi bagian dari kebijakan publik seperti pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, seni, budaya, dan bidang lainnya. Kebijakan di bidang pendidikan ditetapkan guna meningkatkan kualitas dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengakses pendidikan. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah atau lembaga pendidikan dapat menetapkan kebijakan yang mencakup berbagai hal, seperti kurikulum, metode pengajaran, pengembangan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pengawasan dan evaluasi, dan masih banyak lagi (Dwi et al., 2024).

Di Indonesia pendidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada kurikulum sebagai dasar dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun dalam perjalanannya, kurikulum di Indonesia terus mengalami pergantian guna meningkatkan kualitas pendidikan (Putri & Rezania, 2023). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya untuk mengimbangi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu masif dalam bidang pendidikan (Angga et al., 2022). Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia pertama kali dilakukan memakai kurikulum 1947 (Sari et al., 2023). Berikut perubahan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa:

Tabel 1.1 Kurikulum di Indonesia dari masa ke masa

Nama Kurikulum	Karakteristik
Kurikulum 1947	Dikenal dengan Rentjana Pelajaran 1947, bersifat politisi, tidak berfokus pada pendidikan pikiran namun mengutamakan pendidikan karakter untuk membangun rasa nasionalisme (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1952	Disebut dengan Rentjana Pelajaran Terurai, kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional yang paling menonjol adalah setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian dalam silabus mata pelajarannya tercantum secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1964	Disebut Rencana Pendidikan 1964, Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yaitu pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang yaitu moral, kecerdasan, emosionalistik/artistik, keterampilan dan jasmani (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1968	Menggantikan kurikulum sebelumnya dan memiliki fokus lebih berorientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1975	Memiliki beberapa prinsip pelaksanaan yaitu: 1) Pendidikan harus berorientasi pada tujuan. 2) Menggunakan pendekatan integratif agar tujuan pembelajaran menjadi tujuan yang integrative, 3) Lebih menekankan pada efisiensi dan efektivitas, 4) Menganut pendekatan Prosedur

	Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), 5) Stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku (Setiyorini & Setiawan, 2023).
Kurikulum 1984	Dalam kurikulum ini siswa ditempatkan sebagai objek. Mengutamakan proses dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan (Setiyorini & Setiawan, 2023).
Kurikulum 1994	Terjadi perubahan sistem semester menjadi sistem catur wulan dengan tujuan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak (Setiyorini & Setiawan, 2023). Namun justru memberikan beban belajar yang terlalu berat bagi siswa karena terdapat muatan nasional dan muatan lokal ditambah dengan tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan yang mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 1999	Disebut Suplemen Kurikulum 1999, perubahan dari kurikulum sebelumnya hanya menambah sejumlah materi pelajaran saja (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 2004	Disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (<i>learning outcomes</i>) dan keberagaman (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 2006	Disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pada kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian sekolah yaitu guru bertugas mengembangkannya dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah serta daerahnya. Hasil dari seluruh pengembangannya disusun menjadi KTSP

	dibawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan di wilayah terkait (Alhamuddin, 2014).
Kurikulum 2013	Kurikulum ini berbasis kompetensi dengan fokus pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik (Alhamuddin, 2014). Lebih menekankan pada pendidikan karakter, dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter banyak (Setiyorini & Setiawan, 2023).
Kurikulum Darurat	Kurikulum ini hadir pada saat pandemi Covid-19, dimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara <i>hybrid</i> . Kemudian terdapat penyederhanaan kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 di setiap mata pelajaran, hal ini bertujuan agar guru lebih fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya (Kemendikbud, 2020).
Kurikulum Merdeka	Kurikulum ini hadir sebagai upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi Covid-19 dengan kerangka yang lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi siswa melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (Setiyorini & Setiawan, 2023).

Sumber: Olah Data Penulis

Dari data di atas dapat dipahami bahwa perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini terjadi sebanyak 13 kali. Hal ini tentunya dilakukan guna menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Saat ini terdapat tiga jenis kurikulum yang dapat dipilih oleh sekolah sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka (Mulyasa, 2023).

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Permendikbudristek RI Nomor 12 Tahun 2024 dijelaskan bahwa, Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan

Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 73% dari seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia (Mashabi & Kasih, 2024). Dalam Peta Sebaran Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), terdapat 369.875 satuan pendidikan yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka dan pada tingkat SD/ sederajat sudah mencapai 145.785. Kemudian presentase pelaksana IKM di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 98%.

Tabel 1.2
Data Daerah Pelaksana Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Kota Semarang	5.559
2	Kabupaten Cilacap	2.268
3	Kabupaten Banyumas	2.228
4	Kabupaten Brebes	2.221
5	Kabupaten Kebumen	2.149

Sumber: Olah Data Penulis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024)

Data di atas merupakan 5 daerah pelaksana IKM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data, Kota Semarang menjadi pelaksana IKM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 5.559 satuan pendidikan. Kemudian peringkat kedua berada di Kabupaten Cilacap dengan jumlah pelaksana 2.268 satuan pendidikan dan Kabupaten Banyumas menempati peringkat ketiga dengan jumlah pelaksana 2.228 satuan pendidikan.

Tabel 1.3
Data Sebaran Sekolah Dasar/Sederajat Pelaksana Implementasi Kurikulum
Merdeka (IKM) di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Ajibarang	33	2	35
2	Banyumas	31	3	34
3	Baturaden	24	2	26
4	Cilongok	43	2	45
5	Gumelar	32	0	32
6	Jatilawang	36	0	36
7	Kalibagor	21	2	23
8	Karanglewas	21	0	21
9	Kebasen	28	0	28
10	Kedung Banteng	26	3	29
11	Kembaran	29	2	31
12	Kemranjen	33	0	33
13	Lumbir	34	0	34
14	Patikraja	27	0	27
15	Pekuncen	34	1	35
16	Purwojati	20	0	20
17	Purwokerto Barat	18	4	22
18	Purwokerto Selatan	21	6	27
19	Purwokerto Timur	20	11	31
20	Purwokerto Utara	20	2	22
21	Rawalo	22	1	23
22	Sokaraja	30	6	36
23	Somagede	19	0	19
24	Sumbang	37	1	38
25	Sumpiuh	30	0	30

26	Tambak	27	1	28
27	Wangon	45	1	46
TOTAL		761	50	811

Sumber: Olah Data Penulis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024)

Berdasarkan data tersebut, sekolah dasar pelaksana IKM berjumlah 811 yang tersebar di 27 kecamatan, terdapat 761 sekolah dasar negeri dan 50 sekolah dasar swasta. Namun berdasarkan Portal Data Kemendikbudristek, jumlah satuan pendidikan dasar yang aktif baik negeri maupun swasta di Kabupaten Banyumas adalah 1.012. Dengan demikian, ada 201 satuan pendidikan dasar yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka.

Tabel 1.4

Data Nama Sekolah Dasar/Sederajat Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Kecamatan Sokaraja

No	Nama Satuan Pendidikan	Kelurahan/Desa	Status
1	SDN 1 Banjaranyar	Banjaranyar	Negeri
2	SDN 2 Banjaranyar	Banjaranyar	Negeri
3	SDN Banjarsari Kidul	Banjarsari Kidul	Negeri
4	SD Al- Falah Banjarsari Kidul Sokaraja	Banjarsari Kidul	Swasta
5	SDN Jompo Kulon	Jompo Kulon	Negeri
6	Sdn Kalikidang	Kalikidang	Negeri
7	SDN 1 Karangduren	Karangduren	Negeri
8	SDN 2 Karangduren	Karangduren	Negeri
9	SDN 1 Karangkedawung	Karangkedawung	Negeri
10	SDN 2 Karangkedawung	Karangkedawung	Negeri
11	SDN 3 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
12	SDN 1 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
13	SDN 2 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
14	SDN Karangrau	Karangrau	Negeri

15	SDN Kedondong	Kedondong	Negeri
16	SDN 2 Klahang	Klahang	Negeri
17	SDN 1 Klahang	Klahang	Negeri
18	SDN Lemberang	Lemberang	Negeri
19	SDN 2 Pamijen	Pamijen	Negeri
20	SDN 1 Pamijen	Pamijen	Negeri
21	SDN Sokaraja Kidul	Sokaraja Kidul	Negeri
22	SD Kristen Sokaraja	Sokaraja Kidul	Swasta
23	SDN 3 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
24	SDN 4 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
25	SDN 2 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
26	SDN 1 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
27	SD IT Annida Sokaraja	Sokaraja Kulon	Swasta
28	SDN Sokaraja Lor	Sokaraja Lor	Negeri
29	SDN 2 Sokaraja Tengah	Sokaraja Tengah	Negeri
30	SDN 1 Sokaraja Tengah	Sokaraja Tengah	Negeri
31	SD IT Top Kids	Sokaraja Tengah	Swasta
32	SD NU Master Sokaraja	Sokaraja Tengah	Swasta
33	SDN 2 Sokaraja Wetan	Sokaraja Wetan	Negeri
34	SDN 1 Sokaraja Wetan	Sokaraja Wetan	Negeri
35	SDN Wiradadi	Wiradadi	Negeri
36	SD IT Mutiara Ilmu	Wiradadi	Swasta

Sumber: Olah Data Penulis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024)

Berdasarkan data di atas, maka dapat dipahami bahwa jumlah satuan pendidikan tingkat dasar pelaksana IKM di Kecamatan Sokaraja adalah 36 yang terdiri dari 30 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta. SDN 2 Sokaraja Tengah menjadi salah satu sekolah dasar yang sudah terdaftar menerapkan IKM. Pada tahun 2023, SDN 2 Sokaraja Tengah menjadi sekolah rujukan dalam pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP) yang diikuti oleh penulis selama empat bulan, mulai dari tanggal 14 Agustus-14 Desember 2023. AMSP merupakan salah

satu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Selama melaksanakan Program AMSP penulis memiliki berbagai tugas untuk membantu Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM). Salah satunya menjadi guru Mata Pelajaran (Mapel) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) selama formasi guru tersebut kosong. Pada pertengahan bulan Oktober 2023 formasi guru Mapel PJOK telah diisi, namun penulis tetap diberi tugas untuk membantu selama proses KBM berlangsung. Hal ini dikarenakan terdapat dua kelas yang diampu dalam satu kali pembelajaran sehingga jumlah siswa yang mengikuti kelas dapat mencapai 60 siswa. Pada saat penulis melaksanakan Program AMSP terdapat tiga kelas yang sudah menerapkan IKM yaitu kelas 1, 2, dan 4.

Tabel 1.5

Jadwal Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di SDN 2 Sokaraja Tengah Kelas IKM Tahun 2023

No	Hari	Pukul	Kelas
1	Senin	07.00-09.00	4A dan 4B
2	Selasa	07.00-09.00	2A dan 2B
3	Rabu	07.00-09.00	1A dan 1B

Sumber: Olah Data Penulis

Tabel di atas merupakan jadwal Mapel PJOK untuk kelas 1, 2, dan 4. Setiap kelas terdiri dari dua rombel yaitu kelas A dan kelas B. Setiap hari, penulis mendampingi guru Mapel PJOK dalam pelaksanaan KBM terkadang penulis juga menggantikan guru terkait jika berhalangan untuk mengajar. Selama proses KBM terdapat tantangan dan hambatan yang muncul, seperti sarana pembelajaran yang kurang memadai maupun kondisi lapangan olahraga yang rusak. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti karena siswa di SDN 2 Sokaraja Tengah tetap bersemangat dan antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Mapel PJOK. Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai yang diperoleh oleh siswa yaitu:

Tabel 1.6 Data Nilai Rata-Rata Siswa Kelas 5A dan 5B Mapel PJOK

Kelas	P1	P2	P3	P4	P5	SAS	Rata-Rata Nilai PJOK	KKM
5A	86	85	86	85	85	77	84	76
5B	88	88	88	88	88	79	86	76
Nilai Tertinggi Kelas 5A	89	89	89	89	89	86	88	-
Nilai Terendah Kelas 5A	76	76	76	76	76	76	76	-
Nilai Tertinggi Kelas 5B	89	89	89	89	89	94	90	-
Nilai Terendah Kelas 5B	79	80	79	80	79	76	79	-
Nilai Rata-Rata Kelas 5	87	87	87	87	87	78	85	-

Sumber: Olah Data Penulis (Dokumen Pra Survei)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tertinggi kelas 5A dan 5B dari pembelajaran 1-5 sudah melampaui KKM begitu juga pada nilai terendah sudah mencapai KKM yaitu 76. Kemudian nilai rata-rata siswa kelas 5 dari pembelajaran 1-5 adalah 87 dan nilai rata-rata Sumatif Akhir Semester adalah 85. Dengan demikian, seluruh siswa kelas 5 sudah dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Nilai.

Tujuan dari pembelajaran Mapel PJOK dalam Kurikulum Merdeka adalah menciptakan generasi sehat dan berkarakter Pancasila. Melalui pembelajaran PJOK siswa diharapkan dapat memahami bagaimana cara menjaga kebugaran jasmani, menerapkan gaya hidup sehat dan memiliki karakter yang baik. Dalam pelaksanaannya aktivitas pembelajaran Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah dilakukan sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa, dimana guru menerapkan aktivitas olahraga melalui permainan yang melatih ketangkasan, kejujuran, penalaran, disiplin dan kolaborasi antar siswa. Melalui aktivitas ini maka dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan tujuan dari IKM sendiri.

Dengan adanya kondisi tersebut maka penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang ada di SDN 2 Sokaraja Tengah. Dasar dari pelaksanaan IKM berpedoman pada Permendikbudristek RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Merdeka Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Murdiyanto, 2020 penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan acara kuantifikasi lainnya. Keunggulan dari metode penelitian kualitatif adalah pembahasannya lebih mendalam dan terpusat karena data digali secara mendalam (Semiawan, 2010). Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat deskriptif untuk dapat menjelaskan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang terjadi terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Lokasi dari penelitian ini adalah SDN 2 Sokaraja Tengah.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan *purposive sampling* dengan sampel terdiri dari 8 informan yang dianggap memiliki karakteristik dan pengalaman terhadap implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Mapel PJOK di SDN 2 Sokaraja Tengah, diantaranya Kepala Sekolah; Guru Mapel PJOK; siswa kelas 5; dan Ketua KGG Mapel PJOK Kecamatan Sokaraja. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman (1984) yang memiliki tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi (Murdiyanto, 2020).